

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan.

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada publik, salah satunya ialah laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Menurut Nurillah (2014) yang meneliti tentang kualitas laporan keuangan daerah mengungkapkan bahwa, “Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai”. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus memperhatikan informasi yang akan disajikan dalam

laporan keuangan untuk keperluan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

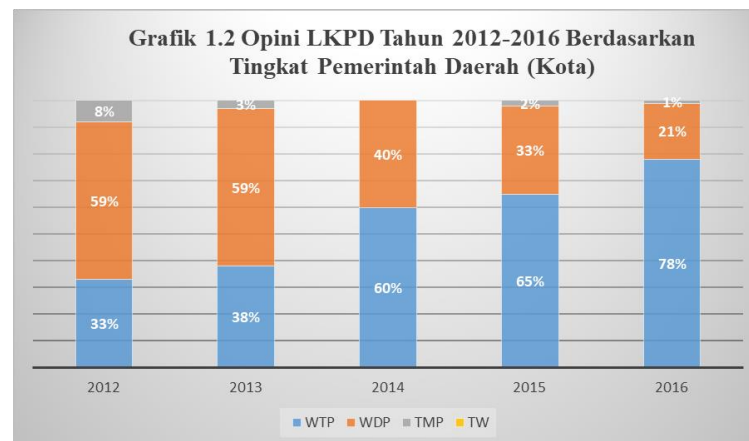
Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai dan manfaat yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No. 71 tahun 2010) diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Unsur-unsur dalam laporan keuangan yang akan disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK), auditor independen akan mengaudit laporan keuangan pemerintah guna untuk mengetahui tingkat kualitas informasi yang dimiliki oleh LKPD tersebut. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), selain itu penyajian laporan keuangan harus patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku, kualitas sistem pengendalian internal, bukti-bukti yang memadai dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan yang nantinya akan menjadi pertimbangan di dalam pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Opini. Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas

pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah Kota dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:



Sumber: <http://www.bpk.go.id-IHPS> 1 Tahun 2017

Dapat terlihat dari grafik tersebut, bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang menurun dari tahun ke tahun dan juga opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) yang mengalami penurunan yang artinya hasil penilaian LKPD dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian, tetap saja masih ada beberapa pemerintah daerah yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) dimana ini perlu menjadi perhatian pemerintah tentang apa saja

penyebab dari pemerintah daerah yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD. Pemerintah daerah juga perlu untuk meningkatkan sistem pengendalian internal terhadap LKPD agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan wajar yang juga merupakan suatu gambaran dari pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Masih banyaknya Laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh badan pengawasan keuangan (BPK). Selain itu, menurut Andri Juhara dalam penelitian Anggraeni (2017), mengungkapkan bahwa “sering terjadinya keterlambatan penyerahan laporan keuangan di tingkat SKPD Sukabumi yang menyebabkan harus bekerja lebih ekstra pada saat laporan keuangan harus diserahkan dalam batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat, hal ini tidak sesuai dengan salah satu syarat kualitatif laporan keuangan yaitu informasi yang disajikan harus relevan diantaranya memiliki manfaat umpan balik, prediktif, tepat waktu dan lengkap”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinyatakan: untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan atas kegiatan pemerintah.

Sistem Pengendalian internal pada Pemerintah Pusat dan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang.

Menurut Situmorang (2016) yang meneliti tentang sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, mengungkapkan bahwa “hal penting yang tidak boleh kita abaikan jika berbicara tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal pemerintah”. Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) secara dini. Sistem Pengendalian Internal akan membantu memandu instansi pemerintah berjalan sebagaimana semestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang Sistem Pengendalian Internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel.

Dalam pelaksanaan kegiatannya pemerintah daerah harus membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Sering terjadinya berbagai kasus korupsi, penyelewengan keuangan negara, pemborosan anggaran dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk salah satunya adalah lemahnya sistem pengendalian internal (Mahmudi, 2011:251 dalam penelitian Widari).

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi selama ini mendapatkan opini atas Laporan Keuangan selalu mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Namun, pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pertama kalinya, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam pengelolaan dan pengadministrasian keuangan sudah baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi meskipun pemerintah Kota Sukabumi sudah mendapatkan predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi masih memiliki kelemahan pada aspek pengelolaan aset yang dikarenakan pengelolaan aset yang belum rapi dan masih terdapat beberapa OPD yang tidak memiliki data aset yang valid sehingga pegawai inventarisasi aset kesulitan dalam melakukan inventarisasi aset.

(sumber: <https://sukabumiekspres.com> – diakses: 15 Februari 2018).

Menurut Susanto dalam penelitian Sapitri (2015), “pengendalian internal yang efektif akan membantu melindungi aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran”.

Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh seberapa baik sistem pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Winidyaningrum, 2009).

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Roviyantie (2011), laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi keuangan. Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.

Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat, Tahria Syafrudin menilai, minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi faktor utama yang menjadi titik lemahnya penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Asisten VI bidang administrasi pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa membenarkan minimnya tenaga SDM yang memiliki latar belakang akuntansi dan auditor sehingga menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(<http://www.pikiran-rakyat.com/node/171153> - diakses:13 februari 2018)

Adapun fakta dilapangan yang terjadi di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi bahwa masih terdapat sumber daya manusia yang bekerja dibidang keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sukabumi yang masih lulusan SMA dan ada beberapa sumber daya manusia bidang keuangan tersebut tidak memiliki latar

belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang keuangan atau akuntansi sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Oleh sebab itu, Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Begitu juga entitas pemerintah, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintah. Berdasarkan latar belakang dengan didukung oleh pendidikan yang sesuai maka kebutuhan dalam hal ini tentunya pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

Sistem Pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika didukung dengan sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan dibidang akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Widari (2016)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Tidak Meneliti Tentang Komitmen Organisasi
2.	Udiyanti, <i>et al</i> (2014)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Secara Simultan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Tidak Meneliti Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

3.	Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAK, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Kompetensi SDM, Penerapan SAK, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Tidak Meneliti Tentang Penerapan SAK dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
4.	Roviyantie (2011)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Tidak Meneliti Tentang Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
5.	Herawati (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif dan Signifikan	Menambah 1 Variabel Lagi Meneliti Tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia

			Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
--	--	--	---	--

Berdasarkan uraian di atas, Pentingnya sistem pengendalian internal yang memadai dan kompetensi sumber daya manusia yang tinggi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan.
2. Masih terdapat entitas yang belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
3. Masih terdapat kelemahan dari sejumlah sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan laporan keuangan pemerintah.
4. Lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah.
5. Laporan keuangan yang belum memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Kegunaan penelitian

Penulis berharap agar hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Adapun kegunaan penelitian di bagi menjadi dua bagian diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk mendapatkan informasi gambaran umum pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menyerap ilmu yang diperoleh.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan ilmu baru bagi peneliti terutama dalam akuntansi sektor publik dalam sudut pandang pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini bisa bermanfaat bagi pemerintah daerah yang dapat memberikan sumbangan saran serta bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi pihak lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi para mahasiswa dan menjadi acuan bagi penelitian di bidang yang sama yaitu pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta menjadi bahan referensi, sumbangan bagi peneliti yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam dan informasi tambahan bagi setiap pembaca.